

BAB IV

PERAN LIGA ARAB DALAM KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana Liga Arab memanfaatkan fungsinya yaitu sebagai artikulasi, agregasi serta informasi dalam memperjuangkan hak-hak para narapidana Palestina di Israel.

A. Fungsi Artikulasi Dan Agregasi Liga Arab

Liga Arab dalam pembentukannya telah memiliki tujuan yang terbilang sangat protektif terhadap negara anggotanya. Terlebih lagi setelah Liga Arab menyepakati perjanjian militer pada tahun 1950, yang mana dengan jelas mengatakan bahwa agresi bagi salah satu negara anggotanya berarti agresi terhadap seluruh negara anggota Liga Arab. Hal ini tentu saja berlaku bagi seluruh negara anggotanya tanpa terkecuali. Pendirian Liga Arab juga dengan tujuan untuk melindungi kedaulatan para negara anggotanya yang mana berarti termasuk juga di dalamnya melindungi hak-hak para warga negara anggotanya. Dengan didirikannya Liga Arab ini, maka menurut Toffolo dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to the League of Arab States*", organisasi ini memiliki visi untuk membantu para negara anggotanya agar dapat memiliki posisi di kancah internasional (Toffolo, *The Arab League*, 2008, p. 19).

Dalam konflik Palestina dan Israel ini, salah satu permasalahan yang selalu menjadi pusat perhatian adalah keadaan dan kondisi para narapidana Palestina di penjara Israel. Dunia internasional tidak hanya berfokus pada keadaan narapidana ketika berada di dalam penjara Israel, namun juga bagaimana Israel menjalankan praktik penangkapan,

penginterogasian serta pengadilan terhadap para tahanan Palestina. Keadaan para narapidana yang menjadi perhatian internasional ini sendiri disebabkan oleh banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel sekalipun telah diatur dalam hukum internasional seperti Konvensi Jenewa. Hal ini yang kemudian dipandang sebagai masalah kemanusiaan yang menimbulkan perhatian dunia (EP, 2017).

Dalam perkembangannya, Liga Arab kerap dianggap tidak dapat menjalankan fungsinya guna membantu konflik Palestina. Namun pada praktiknya Liga Arab sendiri telah menjalankan beberapa fungsinya untuk membantu menyelesaikan konflik Palestina-Israel dan termasuk di dalamnya membantu memperjuangkan hak-hak narapidana Palestina yang mendekam di Israel. Narapidana atau tahanan memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh otoritas yang menahannya dan telah diatur di bawah hukum internasional seperti Konvensi Jenewa. Hak-hak narapidana yang tidak diberikan atau telah dilanggar oleh Israel inilah yang diperjuangkan oleh Liga Arab.

Dalam bukunya yang berjudul *International Organization*, Bennet telah menyebutkan bahwa ada 8 fungsi yang dimiliki setiap organisasi internasional untuk negara anggotanya. Dalam kasus pelanggaran hak-hak narapidana Palestina ini, maka Liga Arab memiliki fungsi untuk melakukan artikulasi dan agregasi. Liga Arab selama tahun 2014 hingga 2017 telah melakukan beberapa hal untuk membantu narapidana Palestina di Israel segera mendapatkan haknya. Liga Arab berupaya menjembatani Palestina dengan Israel; atau Palestina dengan organisasi non-pemerintah serta lembaga terkait untuk membangun komunikasi guna mendapat bantuan untuk memperjuangkan hak narapidana Palestina. Selanjutnya, Liga Arab juga menggabungkan tuntutan-tuntutan rakyat Palestina selama ini terkait konflik kedua negara menjadi sebuah kebijakan yang kemudian dikenal dengan *Arab Peace Initiative* (API). Fungsi selanjutnya yang dimiliki

oleh Liga Arab terkait permasalahan narapidana ialah fungsi informasi. Melalui situs resminya, Liga Arab aktif merilis laporan atau hasil dari setiap perundingan yang telah diadakan. Selain itu Liga Arab juga selalu mengangkat topik narapidana Palestina di forum-forum yang dianggap relevan dengan kasus tersebut (Bennet, 1979).

1. Fungsi Artikulasi

Liga Arab dalam fungsi artikulasi disini dapat diartikan dengan bagaimana organisasi ini berupaya untuk membangun komunikasi atau mengadakan perundingan guna menjembatani Palestina dengan Israel agar isu narapidana Palestina dapat diatasi. Selain dengan Israel langsung, Liga Arab juga berupaya menjembatani Palestina dengan organisasi non-pemerintah lainnya atau bahkan lembaga-lembaga yang relevan dengan isu hak narapidana Palestina ini untuk membantu agar dapat segera diatasi (Bennet, 1979). Liga Arab sendiri dalam praktiknya menyerukan organisasi atau lembaga yang memang bergerak di bidang hak asasi manusia untuk ikut turun tangan terkait isu ini. Organisasi serta lembaga yang bergerak dalam bidang pembela hak asasi manusia dianggap sangat pantas untuk turut andil berupaya mengatasi masalah ini mengingat banyaknya laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap narapidana atau tahanan Palestina (Koirudin, 2004).

Dalam praktiknya seperti Liga Arab terus melakukan upaya untuk membantu para narapidana Palestina di penjara Israel agar dapat segera memperoleh haknya. Pada tanggal 31 Maret 2014, Liga Arab menegaskan bahwa mereka menuntut pembebasan seluruh tahanan wanita dan anak-anak Palestina. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam konflik berkepanjangan ini ialah bagaimana Israel juga turut menahan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi hukum internasional ketika perang. Liga Arab menuntut agar Israel segera membebaskan kelompok tahanan terakhir yang sebetulnya memang telah disepakati Israel sejak sebelum perjanjian Oslo pada tahun 1993.

Dalam perayaan 38 tahun Hari Bumi, Liga Arab memberikan pernyataan untuk kembali menegaskan dukungannya terhadap rakyat Palestina yang masih berupaya untuk mendirikan negara merdeka Palestina dengan batas wilayah tahun 1967 dan dengan ibukota Jerusalem Timur. Liga Arab menyerukan Israel agar segera mencabut pengepungan di Jalur Gaza yang telah berjalan selama lebih dari setengah dekade karena merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional (League).

Liga Arab juga kembali menyerukan komunitas internasional untuk menjalankan tanggung jawabnya serta memberikan tekanan terhadap Israel agar dapat segera menghentikan kebijakan-kebijakannya yang dianggap sangat merugikan Palestina. Dalam kesempatan ini, Liga Arab menekankan penolakan total terhadap upaya Israel mengklaim Jerusalem Timur serta penyerangan beruntun terhadap situs-situs suci sebagai upaya untuk mengubah fakta di lapangan yang akan berujung perubahan kepada identitas Palestina-Arab. Di akhir pernyataannya, ditegaskan juga bahwa Israel harus memenuhi serta menjalankan resolusi PBB dan juga hukum internasional terkait konflik antar dua negara ini (Arab League Demand Release of Palestinian Prisoners, 2014).

Sebelumnya yaitu pada bulan Juli tahun 2013, diadakan sebuah perundingan damai antara Palestina dan Israel. Hasil dari perundingan tersebut ialah Israel setuju bahwa mereka akan membebaskan 104 warga Palestina yang ditangkap sebelum kedua negara ini menandatangani perjanjian damai Oslo di tahun 1993. Namun, setelah pembicaraan damai berlanjut selama sembilan bulan, Israel memutuskan untuk membebaskan hanya 78 narapidana dalam tiga kelompok yang masing-masingnya terdiri dari 26 orang pada bulan April tahun 2014. Dalam perundingan damai yang panjang ini, akhirnya kedua pihak kembali gagal untuk menyetujui kerangka perjanjian damai karena Israel tetap bersikeras untuk menyatakan bahwa Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi (IANS, 2014).

Setelah perundingan damai yang gagal pada tahun 2014 tersebut, tidak terdapat banyak laporan khusus terkait dengan kelanjutan upaya Liga Arab dalam membantu para Narapidana Palestina di penjara Israel pada tahun 2015 hingga 2016. Hingga pada tahun 2017, bertepatan dengan sidang tahunan Liga Arab yang dilaksanakan pada bulan Maret dan berlokasi di Jordania, Liga Arab mengeluarkan *final communique* yang berisikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina serta menentang pembangunan permukiman Israel dan upaya Israel yang ingin menguasai Jerusalem sepenuhnya (League). Tahun 2017 menjadi tahun dimana Liga Arab kembali aktif untuk menyerukan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga yang relevan untuk mengintervensi Israel dalam penanganan kasus narapidana Palestina ini. Liga Arab berperan sebagai pihak yang menjembatani antara organisasi atau lembaga relevan dengan para narapidana Palestina di penjara Israel.

Pada tahun 2017, Liga Arab meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengadakan penyelidikan internasional terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap para narapidana Palestina. Permintaan Liga Arab kepada PBB untuk melakukan penyelidikan ini disebabkan oleh para tahanan Palestina di penjara Israel yang melakukan mogok makan. Aksi mogok makan para narapidana ini terjadi atas tuntutan atas perilaku yang dianggap tidak manusiawi serta melanggar hak-hak narapidana yang telah diatur dalam hukum internasional. Maka atas dasar tindakan para narapidana tersebut, Liga Arab meminta agar PBB dapat melakukan penyelidikan di penjara-penjara Israel yang menampung narapidana Palestina. Liga Arab melalui seruannya kepada PBB ini mengharapkan agar PBB dapat membentuk komisi penyelidikan terkait kasus ini. Melalui komisi tersebut diharapkan nantinya dapat terungkap bagaimanma pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh otoritas Israel terhadap para tahanan. Selain itu, Liga Arab juga menginginkan agar para aktor internasional dapat

memaksa Israel untuk mematuhi serta menjalankan Konvensi Jenewa (Arab League calls for UN probe into rights violations at Israeli jails, 2017).

Pemerintah Palestina sendiri menyatakan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan data yang valid dikarenakan jumlah dari narapidana yang mengikuti aksi mogok makan selalu berubah-ubah. Data yang selalu berubah tersebut karena terdapat narapidana yang memutuskan untuk menarik diri dari aksi mogok makannya dan ada juga yang baru memutuskan untuk bergabung dengan aksi mogok makan tersebut. Tindakan Liga Arab meminta campur tangan dari organisasi atau lembaga terkait ini menjadi upaya Liga Arab dalam menjembatani penyelesaian isu narapidana antara Palestina dan Israel ini (Palestine sector and the occupied Arab territories, 2017).

Para tahanan Palestina di Israel kerap kali melakukan aksi mogok makan karena merasa para otoritas Israel tidak memperlakukan mereka sebagaimana yang telah diatur oleh hukum internasional. Para narapidana berharap aksi mereka dapat memperbaiki setidaknya kondisi penjara Israel tempat mereka ditahan atau bahkan dapat membuat otoritas Israel memberikan hak mereka seperti yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa. Pada tahun sebelumnya yaitu pada bulan Mei tahun 2012, ada setidaknya 1.550 tahanan Palestina yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri aksi mogok makannya karena otoritas Israel telah berjanji memberikan imbalan berupa kunjungan kerabat atau pemindahan dari sel isolasi (Staff, 2017).

Tahun 2017 menjadi salah satu periode dimana Israel menahan setidaknya 6.500 warga Palestina dengan alasan berbagai kejahatan maupun teror. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 500 tahanan yang ditahan tanpa adanya pengadilan ataupun dakwaan. Prosedur ini disebut oleh Israel sebagai penahanan secara administratif, namun hal tersebut melanggar peraturan yang tertulis dalam Konvensi Jenewa ke-

4. Liga Arab melalui Sekretaris Jenderal, Ahmad Abul Gheit mengeluarkan pernyataan bahwa Israel telah menyiksa narapidana Palestina. Pada bulan April tahun 2017 ini, Abul Gheit mendesak Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk segera melakukan intervensi guna menghentikan penyalahgunaan kekuasaan otoritas Israel terhadap para narapidana Palestina yang ditahan di sana. Ia mengirimkan surat kepada Presiden ICRC yaitu Peter Maurer (Secretary General News, 2017). Tindakan Liga Arab ini sebagai respon dari aksi mogok makan yang kerap kali dilakukan oleh para narapidana Palestina di penjara Israel, yang bertujuan untuk menuntut otoritas Israel segera memberikan mereka perawatan medis yang lebih baik serta diberikan akses ke panggilan telepon. Abul Gheit memberikan pernyataan bahwa surat yang ia tujukan kepada ICRC tersebut merupakan upaya untuk menghubungi para aktor internasional agar dapat membantu menghentikan pelanggaran terhadap narapidana Palestina.

Liga Arab melalui Abul Gheit menyerukan ICRC untuk segera menuntut Israel agar memperlakukan tahanan Palestina di penjara Israel sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh standar hukum humaniter internasional. Tindakan Liga Arab yang meminta bantuan ICRC untuk segera ikut campur ini merupakan respon dari bagaimana otoritas Israel bertindak sewenang-wenang terhadap para narapidana Palestina. Terlebih lagi dengan berbagai tindakan pelanggaran hukum internasional seperti Konvensi Jenewa (El-Shahed, 2017).

Pada bulan Mei 2017, Liga Arab mengadakan pertemuan untuk memperingati Nakba Palestina atau yang juga dikenal dengan eksodus rakyat Palestina yang terjadi pada tahun 1948 di markas Liga Arab di Madrid. Peringatan ke-69 Nakba Palestina ini diadakan dengan meminum air asin yang mana menjadi pengingat bahwa ada 1.600 tahanan politik Palestina di dalam penjara Israel yang melakukan mogok makan dan hanya mengonsumsi air dan garam saja sebagai bentuk tuntutan terhadap otoritas Israel supaya segera menerapkan hukum internasional terkait narapidana. Acara peringatan ini

dihadiri oleh seluruh Duta Besar dan Konsul Jenderal negara-negara Arab. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Palestina, Musa Amer Odeh, memberikan informasi bahwa terdapat lebih dari 60 tahanan sedang menghadapi kondisi kritis, namun mereka tetap bersikukuh untuk mempertahankan aksi mogok makannya hingga Israel mau memenuhi tuntutan mereka (Arab ambassadors to Spain support Palestinian prisoners on a hunger strike, 2017).

Sebagai bentuk respon dari seruan atau undangan yang disampaikan oleh Liga Arab terhadap ICRC, terdapat beberapa pernyataan yang diberikan oleh ICRC sendiri. ICRC menyatakan bahwa mereka merupakan organisasi kemanusiaan yang netral sehingga tidak akan mendukung salah satu pihak. Aksi mogok makan yang dilakukan oleh para narapidana Palestina ini memang bukan bentuk protes baru, terhitung sejak tahun 2012, para narapidana terlihat lebih memilih untuk menggunakan aksi mogok makan sebagai bentuk protes atas tindakan-tindakan otoritas Israel di penjara. Peran serta prinsip kerja ICRC sendiri akan berfokus kepada kondisi kesehatan dan kesejahteraan para pelaku aksi mogok makan. ICRC akan selalu berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak para tahanan yang melakukan mogok makan, martabat serta integritas mereka sebagai pasien harus tetap dihormati. Selain itu juga memastikan bahwa perawatan yang mereka terima serta kondisi penahanan mereka haruslah sesuai dengan standar internasional dan juga manusiawi. ICRC juga yang nantinya akan menjembatani komunikasi antara para tahanan dan anggota keluarga selama mereka masih melakukan mogok makan. Sebagai organisasi netral, ICRC tidak dapat melakukan advokasi guna mengakhiri mogok makan atau membuat otoritas Israel menyetujui tuntutan para narapidana. Peran ICRC lebih kepada mendorong para pelaku aksi mogok makan, perwakilan narapidana serta otoritas terkait untuk berkomunikasi dengan baik agar dapat menemukan solusi sehingga dapat mencegah hilangnya nyawa narapidana yang melakukan aksi mogok makan.

Ketika ICRC mengunjungi penjara dimana para narapidana melakukan mogok makan, anggota mereka akan menilai situasi dengan sangat hati-hati agar dapat memahami masalah yang sedang dihadapi. Cara yang diterapkan oleh ICRC untuk mendapatkan penilaian ialah dengan mengadakan pertemuan pribadi bersama para tahanan, berdiskusi dengan manajer penjara, staf perwalian dan staf kesehatan yang bertanggung jawab atas para narapidana. ICRC tidak mendukung aksi mogok makan sebagai bentuk protes para narapidana. Namun ICRC juga tidak akan ikut di dalam negosiasi antara pihak berwenang dan tahanan terkait aksi mogok makan ini. Langkah yang diambil oleh ICRC justru merupakan mendesak pihak-pihak yang terlibat di dalam aksi mogok makan ini. Mereka akan mendesak otoritas penahanan dan juga tahanan untuk segera melakukan negosiasi hingga ditemukan solusi. Sembari mendesak pihak yang terlibat, mereka juga akan terus berusaha untuk memastikan bahwa hak, integritas fisik serta psikologis para tahanan yang melakukan mogok makan akan tetap dihormati. ICRC akan terus mengunjungi para tahanan yang melakukan mogok makan secara berkala untuk melakukan penilaian lanjutan. ICRC juga memiliki hak untuk membantu para tahanan agar bisa berkomunikasi dengan anggota keluarganya guna menyampaikan salam verbal dan terus melaporkan kondisi terkini dari para tahanan atas seizin tahanan itu sendiri (Hunger strikes in prisons in Israel and the occupied territories, 2016).

Tindakan yang dapat diambil oleh ICRC inilah yang mendasari Liga Arab meminta ICRC agar dapat segera turun tangan atas aksi mogok makan narapidana Palestina di penjara Israel. ICRC menjadi salah satu organisasi yang dapat langsung berinteraksi dengan para narapidana di dalam penjara Israel. Di dalam tuntutanannya, salah satu hak yang dituntut oleh para narapidana Palestina yang mogok makan ialah hak untuk dapat tetap berkomunikasi dengan anggota keluarganya. Tindakan Liga Arab yang menyerukan organisasi-organisasi

internasional dan juga lembaga-lembaga internasional yang relevan ini dianggap menjadi keputusan yang baik. Hal tersebut dikarenakan di bawah desakan ICRC, otoritas Israel akan melakukan diskusi untuk bernegosiasi terkait tuntutan narapidana. Selain itu juga atas bantuan ICRC, para narapidana dapat berkomunikasi kembali bersama anggota keluarganya yang mana hal ini juga menjadi perhatian khusus karena para narapidana dibatasi untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga mereka. Tetap menjalin komunikasi dengan anggota keluarga merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam Konvensi Jenewa keempat. Hak untuk tetap berkomunikasi dengan anggota keluarga ini juga merupakan salah satu hak yang tidak diberikan kepada para narapidana Palestina oleh Israel. Israel dan Palestina sama-sama meratifikasi Konvensi Jenewa sehingga keduanya sama-sama terikat oleh hukum yang telah diatur di dalam konvensi tersebut dan harus tunduk dalam menjalankan praktik terkait isu narapidana (*The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols*, 2014).

Selain ICRC, organisasi relevan lainnya yang memberikan perhatian terhadap isu mogok makan narapidana setelah seruan Liga Arab untuk memanggil organisasi relevan agar segera campur tangan terhadap isu ini adalah Amnesty Internasional. Organisasi non-pemerintah ini menyatakan bahwa kebijakan Israel selama puluhan tahun dalam memperlakukan para narapidana di dalam penjara seperti larangan untuk menerima kunjungan keluarga adalah merupakan tindakan kejam dan termasuk ke dalam pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Kesaksian yang mereka kumpulkan dari para anggota keluarga dianggap telah cukup dalam menjelaskan bagaimana penderitaan para tahanan serta keluarga mereka atas kebijakan Israel yang menetapkan larangan kunjungan keluarga ini.

Magdalena Mughrabi, Wakil Direktur Regional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty Internasional, menyatakan bahwa kebijakan kejam yang diberlakukan oleh

Israel untuk menahan para warga Palestina yang ditahan di wilayah pendudukan Palestina adalah pelanggaran utama Konvensi Jenewa keempat. Larangan untuk menerima kunjungan keluarga merupakan tindakan kejam dan dapat menghancurkan. Pihak berwenang Israel juga harus berhenti memberlakukan pembatasan berlebihan kepada hak-hak kunjungan keluarga sebagai cara untuk menghukum tahanan. Justru Israel seharusnya memastikan bahwa kondisi tahanan dan penahanan telah sesuai dengan standar internasional (Israel must end 'unlawful and cruel' policies towards Palestinian prisoners, 2017).

Atas tindakan yang telah diambil oleh Liga Arab untuk meminta seluruh organisasi-organisasi dan juga lembaga-lembaga relevan untuk campur tangan, yang mana pada akhirnya ICRC dan Amnesty Internasional ikut memberikan perhatian terhadap isu ini. Terutama ICRC yang memiliki akses lebih luas terhadap para narapidana Palestina, yang terus mendesak pihak-pihak yang terlibat untuk segera melakukan komunikasi, akhirnya pada tanggal 27 Mei 2017, Israel menawarkan kesepakatan kompromi untuk memenuhi beberapa tuntutan para narapidana yang melakukan aksi mogok makan. Kesepakatan ini menjadi bukti atas keberhasilan ICRC yang dijembatani oleh Liga Arab untuk mendesak pihak yang terlibat agar segera mengadakan komunikasi. Seorang juru bicara layanan penjara Israel, Nicole Englander, mengatakan bahwa mogok makan ini telah berakhir setelah terdapat kesepakatan dengan otoritas Palestina. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa tahanan dapat menerima kunjungan keluarga dua kali dalam satu bulan dan agar tahanan diizinkan berbicara dengan keluarga mereka melalui telepon umum di bawah pengawasan otoritas penjara (Beaumont, 2017).

Kepala Urusan Tahanan Otoritas Palestina, Issa Qaraqe, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akhirnya dapat diambil setelah bernegosiasi selama 20 jam. Juru bicara *Palestine Liberation Organization* (PLO), Javier Abu Eid,

merilis pernyataan bahwa aksi mogok makan ini telah berhasil dan ini juga menjadi langkah yang sangat penting menuju penghormatan penuh terhadap hak-hak narapidana Palestina di bawah hukum internasional. Selain itu, kesepakatan ini juga merupakan pencapaian bagi Liga Arab yang menginisiasi ICRC untuk ikut campur tangan terhadap isu aksi mogok makan yang dilakukan oleh para narapidana Palestina (Media Advisory: Hunger Strike for Freedom and Dignity 2017).

2. Fungsi Agregasi

fungsi agregasi yang dimiliki oleh Liga Arab terlihat dalam praktiknya yang menggagas *Arab Peace Initiative* (API). API awalnya diperkenalkan oleh Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz, yang merupakan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi. Usulannya ini disetujui oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab pada tahun 2002 yang berlokasi di Beirut. Kepentingan utama API ialah bahwa ini merupakan inisiatif yang mewakili konsensus dari 22 negara Arab (serta selanjutnya 57 negara Islam), menjadikan API sebuah rencana dari seluruh negara Arab, bukan hanya rencana beberapa negara atau satu negara Arab. Maka daripada itu, penerimaan Israel atas API akan mengarah kepada perdamaian komprehensif dengan seluruh negara Arab dan negara Islam, terlepas dari adanya perbedaan ideologis mereka.

Setelah itu, API juga membawa kepentingan internasional karena telah dikonfirmasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1850 dan 1860 pada tahun 2008 dan tahun 2009. Hal ini disebutkan di dalam Roadmap Berbasis Kinerja milik Kuartet di tahun 2003. Kuartet sendiri merupakan lembaga yang mensponsori perdamaian negara Palestina dan Israel yang tidak kunjung usai ini. Pihak-pihak yang berada dibalik lembaga ini adalah Rusia, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. Sehingga dengan demikian, API dapat dikatakan menjadi rencana internasional, negara Arab dan negara Islam yang disampaikan kepada Israel. Maka dari itu, komunitas internasional juga bertanggung jawab untuk mempromosikan dan

mengimplementasikan API. Selain itu, kepentingan dari API ialah, Liga Arab telah menciptakan sebuah mekanisme untuk promosi serta implementasi guna memfasilitasi kerja sama dengan komunitas internasional dalam API. Mekanisme tersebut ialah yang pertama, Yordania dan juga Mesir didelegasikan oleh Liga Arab untuk mewakili API dengan Israel; dan kedua, Komite tindak lanjut dibentuk dan diberi tugas untuk mewakili API dengan komunitas internasional. Komite ini diketuai oleh negara yang menduduki jabatan Presiden Liga Arab. Kemudian pada KTT bulan Maret yang berlokasi di Sharm A-Sheikh, Mesir selaku ketua komite pada tahun tersebut menambahkan mekanisme yang ketiga. Dalam mekanisme tarbaru tersebut dibentuk sebuah komite yang terdiri dari Mesir (pemegang kepresidenan Liga Arab saat itu), Yordania (perwakilan Arab di DK PBB), Maroko (pemegang kepresidenan Liga Arab 2016), Nabil Al Arabi selaku Sekretaris Jenderal dan Palestina. Tugas dari komite ini ialah untuk mengangkat status Palestina di PBB. Komite ini mengadakan pertemuan pada tanggal 6 April di Kairo dan memutuskan untuk pergi ke DK PBB dengan rancangan resolusi Arab di bawah payung API yang menyerukan Israel agar mengakhiri pendudukannya atas *Occupation Palestine Territory* (OPT) dalam jangka waktu yang terbatas.

Keputusan yang diambil tersebut menyatakan seruan Menteri Luar Negeri Arab di Kairo pada tanggal 10 Maret, serta seruan oleh Raja Arab Saudi Salman Abdul Aziz pada KTT Arab. Raja Salman juga meminta PBB untuk menunjuk seorang utusan khusus baru yang akan mewujudkan implementasi Resolusi DK PBB berbasis API. Bangsa Arab berharap mekanisme yang telah diputuskan mereka dapat dihormati dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun atau pihak manapun yang boleh menyinggung Arab Saudi dengan meminta mereka untuk berkomunikasi atau bernegosiasi tentang API secara resmi dengan Israel. Hal tersebut dikarenakan Arab telah menunjuk Yordania dan Mesir

dalam satu komite untuk berkomunikasi dengan Israel terkait tugas ini.

Kepentingan terakhir dari API terwakilkan dengan dukungan yang dimiliki meskipun Timur Tengah sedang mengalami kekacauan. Rezim baru di Tunisia, Irak, Libya dan lainnya dapat menerima API serta mekanisme yang dikembangkan oleh Liga Arab. Bahkan API dengan mekanisme yang telah dikembangkan ini dapat menjadi lebih aktif setelah API menjadi rencana internasional. Peran utama API yang dikembangkan oleh Liga Arab ini dalam konteks Palestina-Israel saat ini ialah untuk mengangkat posisi Palestina agar lebih sejajar dengan Israel. Cara ini digunakan untuk menekan pemerintah Israel dengan menggunakan cara diplomatik dan juga alat diplomatik seperti fasilitasi keanggotaan Palestina di PBB, Resolusi DK PBB yang baru dan mekanisme internasional lainnya. Sementara itu, sembari memperjuangkan posisi Palestina dengan hal-hal yang disebutkan tadi, API juga berusaha membangun fakta-fakta di lapangan melalui upaya internasional dan Arab, terutama di Yerusalem Timur, Area C (Tepi Barat) dan rekonstruksi Gaza. Pembangunan fakta-fakta di lapangan ini perlu dilakukan mengingat Israel yang terus berusaha menghilangkan fakta-fakta di lapangan dengan cara seperti menghancurkan situs-situs suci yang ada di wilayah yang telah disebutkan tadi (Salem, 2015).

Awal mula dari rencana ini ialah Resolusi DK PBB baru yang nantinya akan mencakup, dan diikuti oleh implementasi API, implementasi API yang mengarah kepada dibentuknya dua negara yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan. Tahapan-tahapan yang dicanangkan oleh API ialah:

1. Keterlibatan secara kuat dari pihak Amerika Serikat dan juga partai-partai Kuartet (Rusia, Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa) lainnya dengan pemerintah Israel yang baru dianggap sangat penting. Hal ini dikarenakan keterlibatan pihak-pihak tersebut akan

memengaruhi perumusan persyaratan dengan Perdana Menteri Israel terkait apa yang nantinya akan ia presentasikan di meja perundingan, dan apakah persyaratan itu juga akan bertemu dengan persyaratan dari Palestina.

Selama perjanjian pra-negosiasi ini, Perdana Menteri Israel juga sangat dianjurkan atau dinasihati untuk tidak menuntut pengakuan Palestina atas negaranya sebagai Negara Yahudi atau sebagai Negara Rakyat Yahudi selama ia tidak bisa dengan jelas menyebutkan batas-batas wilayah negaranya, tidak menerima Yerusalem sebagai dua ibukota untuk dua negara dan tidak menjamin status Palestina Israel sebagai warga negara Israel maupun daerah tempat tinggal mereka. Perdana Menteri juga harus diberitahu bahwa proses ini didasarkan kepada API, dimana arahnya ialah untuk menciptakan hubungan yang dinormalisasi antara Israel dan negara-negara Arab dan negara Islam.

Sejalan dengan keterlibatannya dengan pemerintah Israel, Kuartet secara intensif harus melibatkan Liga Arab, Yordania, Mesir serta Palestina dalam penyusunan bersama isi Resolusi DK PBB yang baru untuk mengembangkannya dengan secara baik agar nantinya dapat diterima oleh Palestina. Belajar dari pengalaman sebelumnya, hanya mengembangkan serangkaian parameter yang tidak jelas atau prinsip keseluruhan dalam Resolusi DK PBB yang baru akan menjadi kontraproduktif. Sejak negosiasi tahun 1990, bangsa Arab dan Palestina tidak akan menerima apapun selain resolusi yang jelas mengatur dan mencakup jadwal-jadwal untuk mencapai solusi dua-negara yang seharusnya juga mencakup alat serta prosedur yang akan digunakan terhadap pihak manapun yang nantinya gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan resolusi.

Berdasarkan hal ini, sudah jelas bahwa Kuartet harus menyiapkan nota kesepahaman untuk disampaikan kepada para pihak yang akan bernegosiasi sebelum dimulainya kembali proses negosiasi. Melanjutkan negosiasi tanpa hal tersebut dianggap akan menjadi awal untuk bencana serta kegagalan dalam bernegosiasi.

2. Setelah tahap pertama selesai, komunitas internasional akan meminta kedua belah pihak agar dapat terlibat dalam negosiasi tentang masalah status permanen, dimulai dengan diadakannya konferensi internasional. Konferensi ini akan dihadiri oleh negara-negara Kuartet, Liga Arab, negara-negara inti Arab, Israel, negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan) serta perwakilan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dalam konferensi ini nantinya akan diputuskan parameter untuk negosiasi yang akan datang berdasarkan Resolusi DK PBB yang baru, dan akan membentuk komite tindak lanjut internasional untuk negosiasi bilateral. Komite ini nantinya dapat ikut campur dalam negosiasi ketika dibutuhkan untuk memberikan usulan yang sifatnya menjembatani. Komite ini dapat mencakup Amerika Serikat, beberapa negara Uni Eropa seperti Prancis dan Jerman, Uni Eropa, BRICS, negara-negara Arab, Liga Arab, terutama Yordania dan Mesir yang telah ditunjuk sebagai komite urusan Israel oleh Liga Arab atas API (Text of Arab peace initiative adopted at Beirut summit).

Negosiasi yang dilakukan nantinya harus diarahkan langsung oleh Kuartet dan berkoordinasi dengan Liga Arab selaku organisasi yang menginisiasi API, dan juga negara-negara terkait untuk mendorong pengimplementasian API terhadap jalur Israel-Palestina. Koordinasi dengan berbagai blok internasional seperti contohnya BRICS akan sangat

diperlukan untuk memajukan proses sembari membangkitkan beberapa kelompok kerja multilateral. Di dalam langkah unilateral yang harus diambil oleh Israel dalam API selama periode negosiasi, untuk membangun kepercayaan dalam berjalannya negosiasi serta untuk memenuhi kewajiban perjanjian sebelumnya, dalam poin lima dengan jelas disebutkan untuk membebaskan para narapidana Palestina. Hal ini dianggap menjadi bukti dari upaya Liga Arab dalam memperjuangkan hak para narapidana sembari mencari jalan keluar untuk penyelesaian konflik Palestina dan Israel.

Apabila komunitas internasional yang dilibatkan gagal meyakinkan pemerintah Israel yang baru untuk menerima persyaratan untuk dimulainya kembali perundingan, maka mereka harus memiliki rencana alternatif atau *plan B* yang terdiri dari rencana internasional untuk solusi dua negara dengan jadwal serta tolok ukur yang dipenuhi oleh kedua belah pihak dan pihak lainnya. selain itu komunitas juga harus menindaklanjuti implementasi dari rencana tersebut menggunakan sarana ekonomi, teknologi dan dukungan lainnya bagi kedua belah pihak sebagai *carrots and sticks* guna memajukan proses. Hal-hal yang dilakukan apabila kegagalan terjadi ialah, pertama, mendukung inisiatif Palestina untuk meningkatkan status negara Palestina menjadi negara anggota PBB, dan juga menciptakan koalisi internasional dari negara-negara yang memilih untuk menerima Palestina sebagai negara pengamat non-anggota untuk menuju keanggotaan penuh PBB. Kedua ialah, membina kerjasama yang sistematis antara Liga Arab dan Uni Eropa, berdasarkan kepada artikel dan prinsip deklarasi yang diadopsi pada pertemuan Liga Arab dan Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Kairo pada bulan November 2012 dan di Athena pada Juni 2014, lalu bekerja sesuai dengan rencana bersama untuk implementasi API guna mencapai perdamaian kawasan Timur Tengah yang komprehensif. Alternatif terakhir ialah dengan mendukung perjuangan tanpa kekerasan Palestina yang melawan

pendudukan Israel serta mempromosikan kamp perdamaian Israel, Arab dan internasional.

Upaya-upaya yang awalnya didasarkan kepada usaha Liga Arab untuk mencari solusi bagi negara anggotanya ini berhasil menginisiasi Liga Arab untuk meloloskan API dan membawanya ke skala internasional melalui PBB. Meskipun tidak dibahas secara spesifik di dalamnya, namun nasib narapidana Palestina yang berada di penjara Israel tetap menjadi prioritas dari Liga Arab. Melihat bagaimana Liga Arab mengatur kerjasama dengan sedemikian rupa bersama Kuartet memperlihatkan keinginan Liga Arab dapat terlibat lebih dalam lagi dalam proses perdamaian keduanya. Bagaimanapun juga, tujuan utama dari API ialah normalisasi keadaan di Palestina dan juga Israel. Ketika tujuan tersebut telah terpenuhi dan tercapai damai antara negara Palestina dan juga Israel, maka itu berarti para narapidana Palestina juga akan mendapatkan efek dari perdamaian yang bisa dipastikan akan dibebaskan atau paling tidak mereka tidak akan ada lagi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap para narapidana (Sen, 2016).

B. Fungsi Informasi

Menurut Bennet, fungsi ke-delapan dari organisasi internasional ialah informasi. Organisasi internasional memiliki peranan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah serta menyebarkan informasi. Begitu juga dengan Liga Arab yang juga memiliki fungsi informasi dalam pengoperasiannya. Organisasi internasional akan mencari informasi yang berkaitan dengan isu tertentu yang berkaitan dengan jalannya integritas organisasi tersebut. Informasi atau data yang didapatkan bisa saja berasal dari lembaga di bawah naungan organisasi internasional itu sendiri, dari organisasi internasional lainnya yang relevan dengan isu, ataupun lembaga lainnya yang relevan dengan isu. Setelah informasi dan data telah diolah maka informasi valid mengenai isu

tersebut akan disebarakan kepada para negara anggota dan juga negara bukan anggota (umum) (Bennet, 1979).

Dalam praktiknya, Liga Arab juga melakukan hal serupa dengan fungsi informasi yang dikemukakan oleh Bennet. Dapat dilihat langsung pada situs web resminya, dalam setiap rilis yang dipublikasikan, Liga Arab akan mencantumkan sumber dari data yang diperoleh. Tentunya sumber-sumber informasi yang diperoleh oleh Liga Arab adalah sumber yang valid karena berasal dari pengamatan, penelitian ataupun penerjunan langsung ke lapangan oleh lembaga-lembaga, komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi yang kredibel.

Penyebaran atau penyampaian informasi ini sangat penting dalam proses pencapaian kepentingan bagi negara anggota sebuah organisasi internasional. Dalam kasus pelanggaran hak-hak narapidana yang dialami oleh narapidana Palestina di penjara Israel ini, Liga Arab dengan konsisten menyatakan bahwa mereka akan terus mengangkat kasus ini ke forum atau diskusi internasional. Hal itu akan menjadi pengingat bahwa para rakyat Palestina khususnya para Narapidana belum menerima hak-hak mereka. Para masyarakat Palestina masih belum bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya intervensi internasional serta hak untuk kemerdekaan dan kedaulatan, hak untuk memiliki rumah dan harta benda mereka seperti apa yang telah diatur oleh Resolusi PBB nomor 194 (Wardah, 2018).

Seperti dalam laporannya pada tanggal 13 bulan Maret tahun 2015, Liga Arab merilis sebuah laporan yang menginformasikan perkembangan terbaru dari situasi para narapidana di penjara Israel dari tanggal 9 bulan Februari 2015 hingga tanggal 5 bulan Maret 2015. Dalam laporannya tersebut, disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal mengeluarkan laporan penting tentang “perkembangan situasi narapidana di penjara Israel mulai dari 9/2/2015 hingga 5/3/2015”. Laporan tersebut meneliti secara rinci peristiwa yang terjadi selama periode itu, yang mencakup aspek-aspek penyalahgunaan

kekuasaan seperti : tindakan penindasan otoritas pendudukan Israel di wilayah yang diduduki, kebijakan yang diterapkan otoritas Israel berujung kepada kelalaian medis, kondisi tahanan wanita Palestina dan tahanan anak Palestina, hingga kebijakan penahanan administratif (Releases, 2015). Seluruh pelanggaran yang disebutkan telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Hal-hal seperti laporan tersebut sangat dibutuhkan guna memberikan informasi terkait dengan keadaan para narapidana di dalam penjara Israel. Untuk mendukung serta mengupayakan hak-hak narapidana palestina di Israel, Liga Arab membutuhkan bantuan dari organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga internasional yang relevan dan juga mendukung hak para narapidana. Hal inilah yang dilakukan oleh Liga Arab sejak tahun 2014 hingga 2017. Liga Arab menjadi sangat aktif untuk menyerukan organisasi internasional dan lembaga internasional seperti contohnya ICRC untuk segera melakukan intervensi dalam kasus para narapidana ini. Liga Arab dalam mengumpulkan dokumen serta informasinya bekerja sama dengan organisasi pembela hak asasi manusia seperti FIDH dan Addameer.

Upaya Liga Arab dalam memperjuangkan hak-hak para narapidana Palestina dicanangkan dalam visi serta misi Liga Arab sendiri. Dengan jelas dalam laporannya, Liga Arab menyatakan bahwa mereka akan selalu mengangkat isu dari para narapidana dalam berbagai acara regional ataupun internasional, forum dan konferensi, meminta pembebasan narapidana, menghentikan penyiksaan dan menghentikan kurungan isolasi serta seluruh kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap para narapidana wanita (Palestine Affairs Department).

Laporan serta pengangkatan kasus konflik Palestina terutama narapidana Palestina ini menjadi krusial dalam proses penyelesaian konflik kedua negara. Dengan mengangkat kasus narapidana Palestina dalam setiap kesempatan yang ada dapat

membantu Palestina agar selalu diingat bahwa masih terdapat konflik yang belum selesai antara dua negara sekaligus membantu Palestina agar dapat memperoleh dukungan yang lebih banyak lagi dalam kancah internasional. Banyaknya dukungan terhadap Palestina dapat membuat Palestina mensejajarkan kedudukannya dengan Israel.